SURPLUS: JURNAL EKONOMI DAN BISNIS
Tahun 2025, Volume 4, Nomor1, Bulan Juli-Desember: hlm 135-146
e-ISSN: 2964-7665 | URL: https://yptb.org/index.php/sur | e-Mail: jurnalq17@gmail.com

Lisensi: CC-BY
DOI: https://doi.org/10.71456/sur.v4i1.1579

IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH INDONESIA

Fathiya Syahidah Nasution[1*], Dian Zahra Syahfitri Lubis[2], Mutia Salwa Hutauruk[3], & Ahmad Wahyudi Zein[4]
[*1-4] Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
[*]e-Mail: fathiyasyhdh26@gmail.com

Submit Tgl: 29-Desember-2025 Diterima Tgl: 29-Desember-2025 Diterbitkan Tgl: 29-Desember-2025

Abstract: *With the advancement of Islamic banking that requires the management of institutions in a transparent, accountable manner, and in accordance with sharia principles. The purpose of this study is to provide an explanation regarding the role of Good Corporate Governance and the Sharia Supervisory Board in encouraging the performance of Islamic banking in Indonesia. The method used is a qualitative descriptive approach using literature sources including scientific journals and several books. The results of the discussion show that the provision of good governance strengthens the organizational structure, operational efficiency, and public trust. The role of the Sharia Supervisory Board participates in maintaining sharia compliance to the consistency of business ethics. The synergy between governance and sharia supervision has a favorable impact on institutional stability. The findings present a comprehensive picture of institutional practices, risk management, and implications for strengthening the Islamic banking system in Indonesia by being sustainable and adaptive to business dynamics. The conclusion shows that the integration of Good Corporate Governance and sharia supervision is a necessary foundation to increase the performance and sustainability of national Islamic banking.*

Keywords: *Good Corporate Governance; Supervisory Board; Performance; Islamic Banking*

Abstrak: Dengan adanya kemajuan perbankan syariah yang mengharuskan pengelolaan lembaga secara transparan, akuntabel, serta menyesuaikan prinsip syariah. Tujuan kajian ini ialah memberikan penjelasan terkait peranan *Good Corporate Governance* serta Dewan Pengawas Syariah dalam mendorong kinerja perbankan syariah di Indonesia. Metode yang dimanfaatkan ialah pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber literatur termasuk jurnal ilmiah serta beberapa buku. Hasil pembahasan memperlihatkan yakni pengadaan tata kelola yang baik memperkuat struktur organisasi, efisiensi operasional, serta kepercayaan publik. Peranan Dewan Pengawas Syariah ikutserta memelihara kepatuhan syariah hingga konsistensi etika bisnis. Sinergi antara tata kelola serta pengawasan syariah berdampak baik bagi stabilitas lembaga. Temuan ini menghadirkan gambaran komprehensif terkait praktik kelembagaan, pengelolaan risikonya, serta implikasinya pada penguatan sistem perbankan syariah di Indonesia dengan berkelanjutan serta adaptif pada dinamika usaha. Kesimpulan memperlihatkan yakni integrasi *Good Corporate Governance* serta pengawasan syariah sebagai fondasi yang diperlukan agar menambah kinerja serta keberlanjutan perbankan syariah nasional.

Copyright©2025: Fathiya Syahidah Nasution, Dian Zahra Syahfitri Lubis, Mutia Salwa Hutauruk, & Ahmad Wahyudi Zein

Kata Kunci: *Good Corporate Governance;* Dewan Pengawas; Kinerja; Perbankan Syariah

Cara mengutip Nasution, F. S., Lubis, D. Z. S., Hutauruk, M. S., & Zein, A. W. (2025). Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kinerja Perbankan Syariah Indonesia. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *4*(1), 135–146. https://doi.org/10.71456/sur.v4i1.1579

PENDAHULUAN

Perbankan syariah yang berkembang menjadi bagian dari sistem keuangan yang mengutamakan nilai keadilan serta etika pada praktik usaha. Kemajuan tersebut menuntut pengelolaan lembaga keuangan yang dilaksanakan dengan profesional serta bisa dipercaya. Pengelolaan yang baik sebagai faktor yang diperlukan ketika memelihara keberlangsungan operasional perbankan. Tata kelola perusahaan punya peranan yang membentuk sistem pengelolaan yang tertib serta terarah. Penerapan tata kelola memudahkan penyeimbangan keperlian berbagai pihak yang terlibat. Kompleksitas lingkungan usaha mendukung butuhnya langkah pengawasan yang efektif. Oleh sebab itu, langkah mengelola yang berintegritas sebagai keperluan utama dalam industri perbankan (Albanjari *et al*., 2023).

Selain aspek pengelolaan, perbankan syariah bisa berkarakteristik yang berbeda daripada dengan lembaga keuangan lainnya. Tiap kegiatan operasional harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Kesetaraan inipun menjadi dasar dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Peralihan regulasi serta inovasi produk keuangan memunculkan tantangan baru ketika mengelola lembaga syariah. Kondisi ini menuntut sistem pengawasan yang terlaksana dengan konsisten. Stabilitas lembaga sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengawasan internal. Maka dari itu, keterpaduan antara pengelolaan serta pengawasan sebagai fondasi yang diperlukan ketika memajukan perbankan syariah (Muhajir *et al*., 2024).

Penelitian terdahulu dari Seppi Mustion, Ahmad Wira, dan Rozalinda (2024) menelaah peran Dewan Pengawas Syariah juga implementasi *Good Corporate Governance* pada hubungannya bersama kinerja perbankan syariah di Indonesia. Penelitian inipun mengimplementasikan pendekatan kuantitatif dengan memakai data sekunder asalnya dari laporan keuangan serta penerapan tata kelola. Kajian terfokus di berbagai bank umum syariah yang dipilih menyesuaikan kriteria tertentu dalam periode pengamatan tertentu. Hasil penelitian memperlihatkan yakni mekanisme pengawasan syariah serta pengadaan tata kelola bisa berhubungan dengan kinerja perbankan syariah. Dalam parsial, pengawasan syariah memperlihatkan pengaruh yang signifikan bagi kinerja lembaga keuangan syariah. Implementasi prinsip *Good Corporate Governance* memunculkan dampak positif pada penambahan kinerja bank syariah.

Copyright©2025: Fathiya Syahidah Nasution, Dian Zahra Syahfitri Lubis, Mutia Salwa Hutauruk, & Ahmad Wahyudi Zein

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan deskriptif kualitatif agar memperlihatkan fenomena terkait pada tata kelola dan pengawasan dalam perbankan syariah. Pendekatan ini memberi kejelasan yang pasti pada konsep dan praktik yang berkembang. Informasi penelitian didapatkan pada sejumlah sumber tertulis seperti jurnal ilmiah dan buku. Literatur yang dimanfaatkan menghadirkan pengetahuan mendalam teoritis terkait langkah pengelolaan serta pengawasan syariah. Pendekatan kualitatif memastikan memahami konteks serta arti dari fenomena yang dikaji. Penelitian ini ditujukan agar memberi gambaran umum keadaan kelembagaan perbankan syariah. Penyajian dilaksanakan dengan sistematis dan deskriptif. Sehingga, fenomena bisa diketahui dengan keseluruhan (Sumbodo *et al*., 2024).

Metode deskriptif kualitatif juga dimanfaatkan agar mengungkapkan hubungan antara tata kelola, pengawasan, serta kinerja perbankan syariah. Pendekatan inipun menyoroti pola serta kecenderungan yang hadir pada kajian literatur. Informasi yang didapatkan tersusun dengan berbentuk uraian naratif. Penelitian tidak berfokus pada pengukuran angka, namun pada kejelasan konseptual. Pemilihan metode ini sesuai untuk mengkaji isu tata kelola yang bersifat normatif. Literatur yang dimanfaatkan memperlihatkan kemajuan pola pikir di bidang keuangan syariah. Melalui pendekatan ini, gambaran kondisi perbankan syariah bisa tersajikan dengan komprehensif. Hasil pemaparan diinginkan memperbanyak pengetahuan mendalam terkait dengan praktik kelembagaan.

Penelitian ini tersusun dengan menekankan pendekatan konseptual agar mengetahui hubungan dari tata kelola perusahaan dan pengawasan syariah. Kajian terfokuskan di penggambaran prinsip serta langkah yang diberlakukan dalam perbankan syariah. Literatur yang relevan digunakan menjadi dasar agar beri kejelasan pada praktik kelembagaan dengan normatif. Pendekatan ini dimanfaatkan agar mencari peran struktur organisasi ketika memelihara kepatuhan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Good Corporate Governance dalam Perbankan Syariah

Good Corporate Governance diketahui menjadi sistem pengelolaan dengan menunjukkan serta mengelola organisasi supaya terlaksana menyesuaikan prinsip yang sudah dipastikan. Sistem ini meliputi struktur kelembagaan, mekanisme kerja, serta tahap mengambil keputusan. Tata kelola yang baik mendukung keterbukaan informasi kepada pihak yang berkeperluan. Keterbukaan ini memudahkan dalam menambah tingkat kepercayaan terhadap lembaga. Akuntabilitas dalam tata kelola memastikan kepastian peran dan tanggung jawab ditiap unsur organisasi. Prinsip tanggung jawab menuntut kepatuhan pada ketentuan dan norma yang diberlakukan. Independensi menjaga objektivitas ketika melaksanakan fungsi pengelolaan. Keadilan menjamin tindakan yang diterima seimbang di semua pemangku kepentingan (Harahap, 2025).

Copyright©2025: Fathiya Syahidah Nasution, Dian Zahra Syahfitri Lubis, Mutia Salwa Hutauruk, & Ahmad Wahyudi Zein

Impelementasi *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah sebagai dasar utama ketika mengelola lembaga keuangan dengan berintegritas. Tata kelola fungsinya menuntun semua kegiatan organisasi agar berjalan sesuai ketentuan. Penerapan prinsip ini memudahkan membantu sistem kerja yang teratur. Tata kelola yang baik mendukung terbentuknya pengelolaan yang transparan serta bertanggung jawab. Transparansi mempermudah pihak yang berkeperluan memahami kondisi lembaga. Keterbukaan informasi menambah kepercayaan masyarakat. Kepercayaan ini punya peranan penting ketika memelihara keberlanjutan perbankan syariah (Pratiwi *et al*., 2022).



Gambar 1. Prinsip Good Corporate Governance (GCG)
Sumber: https://nusindo.co.id/prinsip-gcg/

Akuntabilitas ialah elemen yang diperlukan dalam penerapan tata kelola perbankan syariah. Di tiap bagian organisasi punya peranan serta bertanggung jawab dengan jelas. Kejelasan ini memudahkan langkah pengawasan internal. Manajemen diharuskan bisa bertanggung jawab setiap kebijakan yang diambil. Akuntabilitas mendukung langkah mengambil keputusan yang lebih berhati-hati. Dengan sistem pertanggungjawaban yang baik, risiko kesalahan bisa diminimalkan. Hal ini berdampak positif bagi stabilitas lembaga.

Prinsip tanggung jawab pada tata kelola terkait kepatuhan pada aturan dan norma. Perbankan syariah diharuskan menerapkan kegiatan usaha menyesuaikan aturan yang diberlakukan. Kepatuhan memperlihatkan komitmen lembaga terhadap praktik bisnis yang sehat. Tanggung jawab juga meliputi perhatian pada dampak sosial. Perbankan syariah diinginkan bisa memunculkan manfaat bagi masyarakat. Sikap bertanggung jawab memperkuat citra lembaga. Citra positif mendorong berjalannya usaha (Hendra & Fahlevi, 2024).

Independensi sebagai prinsip yang diperlukan ketika memelihara objektivitas pengelolaan perbankan syariah. Tiap keputusan diharuskan siap tanpa tekanan dari pihak tertentu. Independensi memudahkan pencegahan adanya konflik kepentingan. Struktur pengelolaan yang independen menguatkan fungsi pengawasan. Keputusan dengan objektif menambah efektivitas operasional. Pada independensi, tata kelola bisa terlaksana dengan profesional. Hal ini mengevaluasi kualitas pengelolaan lembaga.

Copyright©2025: Fathiya Syahidah Nasution, Dian Zahra Syahfitri Lubis, Mutia Salwa Hutauruk, & Ahmad Wahyudi Zein

Prinsip keadilan menekankan tindakan yang seimbang pada semua pemangku kepentingan. Nasabah, karyawan, dan pihak terkait meraih hak menyesuaikan aturan. Perlakuan yang adil menghadirkan keterkaitan dengan harmonis. Hubungan yang harmonis mendorong stabilitas organisasi. Keadilan juga menghindari praktik diskriminatif. Pada keadilan, kepercayaan pihak yang berkeperluan bertambah. Kondisi ini mendorong iklim usaha yang sehat (Mustika *et al*., 2024).

Implementasi Good *Corporate Governance* membutuhkan komitmen dari manajemen. Kepemimpinan dengan berintegritas sebagai faktor penentu kesuksesan tata kelola. Nilai-nilai tata kelola butuh diimplementasikan pada kebudayaan organisasi. Budaya yang kuat mendukung konsistensi penerapan prinsip. Konsistensi membantu menekan potensi penyimpangannya. Dengan kuat dalam berkomitmen, tata kelola dapat berjalan efektif. Hal ini menguatkan kepercayaan publik.

Lingkungan regulasi ikut memengaruhi implementasi tata kelola perbankan syariah. Regulasi menghadirkan petunjuk pada pengelolaan lembaga. Kepatuhan terhadap regulasi sebagai indikator tata kelola dengan baik. Perubahan kebijakan menuntut kemampuan beradaptasi dalam organisasi. Adaptasi dibutuhkan supaya operasional tetap terlaksana dengan maksimal. Dengan kepatuhan regulatif, stabilitas lembaga terjaga. Stabilitas inipun mendorong kinerja jangka panjang.



Gambar 2. Meningkatkan Efisiensi
Sumber: https://www.solutions360.com/9-steps-improve-operational-efficiency/

Penerapan tata kelola yang konsisten menghadirkan pengaruh signifikan bagi penambahan efektivitas operasional di lembaga perbankan syariah. Aktivitas kerja yang diadakan menjadi lebih teratur, sistematis, serta letaknya di bawah pengawasan yang jelas. Kondisi ini mungkin saja pada penggunaan sumber daya manusia, modal, dan teknologi dengan makin efisien dan terencana. Efisiensi yang terpenuhi ikut mendorong peningkatan mutu layanan yang disiapkan pada nasabah. Kualitas layanan dengan baik sebagai faktor kunci ketika merancang reputasi baik bagi lembaga perbankan syariah.

Penambahan mutu layanan dengan langsung memengaruhi tingkat kepuasan nasabah. Kepuasan nasabah umumnya menaruh kepercayaan lebih tinggi terhadap produk dan layanan yang ditawari. Kepercayaan ini mendukung terbentuknya keterkaitan jangka panjang antara nasabah dengan lembaga perbankan. Keterkaitan dengan berkesinambungan menguatkan

Copyright©2025: Fathiya Syahidah Nasution, Dian Zahra Syahfitri Lubis, Mutia Salwa Hutauruk, & Ahmad Wahyudi Zein

loyalitas nasabah bagi layanan perbankan syariahnya. Loyalitas nasabah lalu sebagai kontribusi yang diperlukan pada pertumbuhan serta kemajuan lembaga secara berkelanjutan.

Good Corporate Governance sebagai landasan utama ketika mengelola perbankan syariah dengan mengedepankan prinsip keadilan dan keterbukaan. Impelementasi prinsip tata kelola yang baik bisa menguatkan struktur organisasi termasuk memastikan pembagian peranan serta tanggung jawab. Tata kelola dengan berefisien juga menjamin yakni di tiap langkah operasional terlaksana menyesuaikan dengan aturan dan nilai-nilai syariah. Hal ini memucnulkan keseimbangan di pencapaian tujuan finansial serta pemenuhan aspek etikanya. Keseimbangan ini sebagai karakteristik pembanding yang muncul dari perbankan syariah serta perbankan konvensional (Rohman & Sari, 2024).

Keseimbangan dari keperluan ekonomi dan prinsip etika punya peranan yang diperlukan dalam mennciptakan kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan syariah. Kepercayaan publik ialah modal utama agar menjaga stabilitas operasional dan reputasi lembaganya. Stabilitas yang terpelihara menjadikan lembaga menghadapi sejumlah dinamika juga risiko usaha bisa makin efektif. Sementara itu, stabilitas inipun juga mendukung berjalannya usaha dalam jangka panjang.

B. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah

Pengawasan dalam perbankan syariah fungsinya memelihara kesesuaian operasional pada beberapa prinsip syariah. Peran ini dilaksanakan lewat mekanisme pengawasan dengan terususun serta berkelanjutan. Pengawasan syariah membantu memastikan bahwa produk serta kegiatan usaha tak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Kehadiran pengawasan menambah legitimasi lembaga pada masyarakat. Proses pengawasan diadakan dengan mengevaluasi serta memberikan rekomendasi. Hubungan antara pengawas serta manajemen sifatnya yang koordinatif namun tetap independen. Efektivitas pengawasan berkontribusi pada pengendalian risiko kepatuhan. Pada pengawasan dengan konsisten, stabilitas lembaga bisa terpelihara (Hatta, 2024).

Dewan Pengawas Syariah punya posisi yang diperlukan dalam struktur kelembagaan perbankan syariah. Dengan kemunculannya punya fungsi dengan kesesuaian seluruh kegiatan usaha pada prinsip syariah. Pengawasan syariah sebagai ciri khas utama perbankan syariah. Peranan inipun membandingkan perbankan syariah dari sistem perbankan lainnya. Pada pengawasan yang konsisten, identitas lembaga bisa terjaga. Kepastian fungsi pengawasan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan tersebut mendukung keberlangsungan menambah tingkat (Rafsanjani, 2021).

Tabel 1. Peran Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam Kegiatan Perbankan

Situasi	Peran Pengawasan DPS
Pengembangan produk pembiayaan	Pemeriksaan kecocokan akad pada prinsip syariah
Pelaksanaan pembiayaan	Pemantauan pemanfaatan akad ketika bertransaksi
Penentuan tingkat keuntungan	Pengkajian struktur imbal hasil menyesuaikan syariah
Kegiatan operasional rutin	Pengawasan berkelanjutan bisa mencegah pelanggaran
Pelaporan keuangan bank	Penelaahan kepatuhan laporannya pada ketentuan syariah

Tugas utama Dewan Pengawas Syariah ialah menjamin kepatuhan terhadpada aturan syariah. Tiap aktivitas operasional harus menyesuaikan prinsip yang diberlakukan. Proses

Copyright©2025: Fathiya Syahidah Nasution, Dian Zahra Syahfitri Lubis, Mutia Salwa Hutauruk, & Ahmad Wahyudi Zein

pengawasan dilaksanakan dengan berkesinambungan. Pengawasan ditujukan agar menghindari adanya penyimpangan syariah. Pencegahan ini perlu agar memelihara reputasi lembaga. Reputasi yang baik menguatkan kedudukan perbankan syariah. Kedudukan inipun mendorong stabilitas operasional.

Dewan Pengawas Syariah juga bisa membuat nasihat. Nasihat diserahkan ke manajemen tentang kebijakan dan operasional. Peran ini memudahkan manajemen mengetahui lebih dalam aspek syariah ketika mengambil keputusan. Hubungan kerja dari pengawas serta manajemen sifatnya yang koordinatif. Koordinasi yang baik menambah efektivitas pengelolaan. Dengan kepastian arahannya, kebijakan jadi makin terarah. Hal ini mendorong kinerja lembaga (Yusra *et al*., 2024).

Independensi Dewan Pengawas Syariah ialah bagian yang diperlukan agar melaksanakan tugasnya. Independensi memberi kepastian pada objektivitas ketika mengawas. Pengawas harus bebas dari pengaruh kepentingan tertentu. Objektivitas menambah kualitas penilaiannya serta rekomendasi. Rekomendasi yang objektif menguatkan sistem pengendalian internal. Pengendalian yang kokoh bisa memelihara stabilitas lembaga. Stabilitas ini berdampak di kepercayaan publik.

Peran Dewan Pengawas Syariah juga terkait pada implementasi etika bisnis. Etika sebagai landasan pada tiap kegiatan perbankan syariah. Pengawasan syariah memastikan nilai etika diadakan dengan konsisten. Konsistensi etika menciptakan budaya kerja yang berintegritas. Budaya inipun memengaruhi perilaku semua bagian organisasi. Etika dalam lingkup kerja bisa membuat kinerja yang sehat. Hal ini menguatkan citra lembaga.

Dewan Pengawas Syariah ikutserta ketika mengelola suatu risiko. Risiko kepatuhan ialah sebuah risiko terdepan perbankan syariah. Pengawasan membantu mengidentifikasi potensi risikonya dari awal. Identifikasi dini membuat langkah pencegahan yang tepat. Pencegahan risiko mendorong terlaksananya operasional. Dengan mengendalikan risiko, stabilitas suatu kelembagaan terpelihara. Stabilitas ini diperlukan bagi keberlanjutan usaha.

Pengawasan syariah juga punya peranan untuk mendorong transparansi lembaga. Transparansi berkaitan pada keterbukaan informasi kepatuhan syariahnya. Informasi yang terbuka menambah akuntabilitas lembaga. Akuntabilitas menguatkan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan mendukung penambahan partisipasi nasabah. Keikutsertaan saat mendorong kemajuan lembaga. Pertumbuhan mencerminkan kinerja yang positif.

Kualitas penerapan tugas Dewan Pengawas Syariah sangat disebabkan dari kompetensi dari seluruh anggotanya. Kompetensi ini meliputi pengetahuan yang mendalam pada prinsip syariah juga pemahaman pada aspek keuangan. Penguasaan kedua aspek itu sebagai dasar ketika memenuhi fungsi pengawasan secara efektif. Pengawas yang kompeten bisa menganggap kecocokan kebijakan dan praktik operasional secara lebih akurat. Dengan kemampuan ini, pengawasan bisa dilaksanakan dengan optimal dan berkelanjutan (Sari *et al*., 2023).

Sementara itu, kompetensi Dewan Pengawas Syariah punya peranan agar menambah tingkat kualitas pengawasan pada dinamika industri keuangan. Wawasan yang luas dari sosok pengawas bisa memajukan serta merubah lingkungan usaha. Kemampuan adaptasi ini memudahkan pengawas tetap relevan ketika melaksanakan fungsinya. Pengawasan yang adaptif mendorong penghindaran potensi permasalahan sejak dini. Hal inipun berkontribusi pada penguatan peranan yang strategis bagi Dewan Pengawas Syariah.

Copyright©2025: Fathiya Syahidah Nasution, Dian Zahra Syahfitri Lubis, Mutia Salwa Hutauruk, & Ahmad Wahyudi Zein

Dewan Pengawas Syariah juga ikut serta secara akti dalam melaksanakan kepatuhan operasional perbankan syariah. Pengawasan yang dilaksanakan memastikan semua aktivitas menyesuaikan prinsip dan nilai syariah. Kepatuhan tersebut memberikan jaminan kepercayaan pada masyarakat. Kepercayaan publik menguatkan legitimasi suatu lembaga perbankan syariah. Legitimasi yang dinilai kuat, stabilitas lembaga bisa terus terpelihara (Syahputri & Adi, 2020).

Sinergi antara Dewan Pengawas Syariah dan manajemen sebagai faktor yang diperlukan pada efektivitas pengelolaan perbankan syariah. Kerja sama yang baik mendorong penerapan pengawasan dengan lebih diutamakan. Koordinasi yang intensif memudahkan pihak manajemen mengetahui rekomendasi pengawas. Penerapan rekomendasi ikut berdampak dengan menambah tingkat kinerja lembaga. Oleh sebab itu, Dewan Pengawas Syariah punya peranan menjadi pilar utama pada struktur kelembagaan perbankan syariah.

C. Kontribusi *Good Corporate Governance* dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Perbankan Syariah

Good Corporate Governance dan Dewan Pengawas Syariah punya hubungan yang yang kuat ketika mendorong kinerja perbankan syariah. Tata kelola menyediakan kerangka pengelolaan organisasi dengan tersusun. Pengawasan syariah menjamin kerangka tersebut terlaksana menyesuaikan prinsip syariah. Keterpaduan keduanya menciptakan sistem untuk mengelola serta saling mendukung. Sistem ini membantu menambah efektivitas operasional lembaga. Efektivitas operasional berdampak pada kinerja perbankan. Maka dari itu, kinerja disebabkan dari kualitas tata kelola dan pengawasan (Shalihin *et al*., 2025).

Penerapan *Good Corporate Governance* mendukung adanya efisiensi dalam aktivitas operasional. Proses kerja menjadi lebih tertib dan terarah. Sturktur organisasi yang jelas ketika mengambil keputusan. Efisiensi membantu pemanfaatan sumber daya secara optimal. Penggunaan secara maksimal bisa meningkatkan kinerja suatu lembaga. Kinerja yang baik menambah daya saing perbankan syariahnya. Daya saing penting ketika melewati persaingan industri keuangan.

Tabel 2. Pengaruh Kepatuhan Syariah dan Tata Kelola

Situasi	Implikasi terhadap Kinerja Perbankan Syariah
Pelaksanaan pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah	Menciptakan perasaan aman nasabah serta menciptakan kepercayaan berkelanjutan pada institusi
Penerapan prinsip syariah dalam kegiatan operasional	Sebagai acuan yang diperlukan ketika menilai kinerja nonfinansial dari masyarakat
Kerja sama antara manajemen dan pengawasan syariah	Menguatkan tahapan pengendalian internal serta tata kelola suatu lembaga
Pengendalian risiko dalam aktivitas operasional	Mendorong kestabilan kinerja juga kesinambungan usaha perbankan
Keterbukaan dan pertanggungjawaban kinerja lembaga	Menguatkan citra institusi serta mendukung kemajuan perbankan syariah

Dewan Pengawas Syariah punya peranan dalam memelihara kinerja melalui kepatuhan pada prinsip syariah. Kepatuhan syariah sebagai bagian yang diperlukan dalam penilaian kinerja perbankan syariah. Nasabah menilai kinerja tak saja dari keuntungan finansial. Kecocokan nilai bisa menjadi pertimbangan perdepan pada masyarakat. Pengawasan syariah

Copyright©2025: Fathiya Syahidah Nasution, Dian Zahra Syahfitri Lubis, Mutia Salwa Hutauruk, & Ahmad Wahyudi Zein

menambah perasaan nasabah. Rasa aman mendukung kepercayaan jangka panjang. Kepercayaan ini berdampak bagi stabilitas lembaga.

Sinergi dari tata kelola serta pengawasan syariah menguatkan sistem pengendalian internal. Pengendalian internal fungsinya mengurangi risiko operasional. Pengendalian risiko mendorong stabilitas kinerja lembaga. Stabilitas memungkinkan perencanaan usaha dengan makin baik. Kejelasan rencana bisa menambah kualitas layanan. Kualitas layanan berdampak pada kepuasan nasabah. Kepuasan menjadi indikator yang diperlukan pada kinerja perbankan (Mohammad et al., 2022).

Good Corporate Governance ikut serta menaikkan tingkat transparansi kinerja lembaga. Transparansi mempermudah pihak yang berkepentingan memahami kondisi perbankan. Keterbukaan informasi mendukung akuntabilitas manajemen. Akuntabilitas mndukung tanggung jawab ketika mengelola. Pada akuntabilitas, kinerja bisa dipelihara secara konsisten. Konsistensi kinerja menambah reputasi lembaga. Reputasi yang baik mendorong kemajuan perbankan syariah.

Dewan Pengawas Syariah punya peranan memelihara dimensi etika dalam kinerja lembaga. Etika bisnis sebagai aspek yang diperlukan dari perbankan syariah. Pengawasan etika menjamin kegiatan usaha terlaksana menyesuaikan nilai moral. Penerapan etika membangun kepercayaan masyarakat. Kepercayaan mendukung keikutsertaan dengan makin luas. Partisipasi masyarakat berdampak pada kemajuan usaha. Kemajuan inipun memperlihatkan kinerja yang positif (Harisoesyanti, 2020).

Kinerja perbankan syariah ialah representasi dari kapasitas kelembagaan ketika mengelola serta mengadakan aktivitas usaha dengan efektif dan berkesinambungan. Penilaian kinerja tak dibatasi dalam capaian keuangan, tetapi juga mencakup mutu pelayanan juga tingkat kepatuhan serta aturan syariah. Tata kelola yang terorganisasi dengan baik berperan ketika menambah efisiensi pemanfaatan sumber daya. Efisiensi ini mendorong optimalisasi produktivitas pada kegiatan operasional lembaga. Kepercayaan nasabah sebagai bagian yang diperlukan ketika menilai kualitas kinerja perbankan syariah. Kepercayaan inipun berkontribusi pada terpeliharanya stabilitas operasional lembaga. Stabilitas ini disebabkan dari sistem pengendalian internal yang diimplementasikan dengan konsisten. Maka dari itu, kinerja tersebut memperlihatkan keberhasilan pengelolaan lembaga dengan keseluruhan dan terpadu (Rusmini, 2023).

Kinerja perbankan syariah juga disebabkan dari adanya kebudayaan organisasi. Tata kelola yang baik memudahkan pembentukan budaya kerja yang disiplin. Pengawasan syariah menguatkan kebudayaan menyesuaikan nilai syariah. Budaya yang kuat mendorong tindakan kerja profesional. Profesionalisme menambah kualitas operasional lembaga. Operasional yang berkualitas berpengaruh pada kinerja. Dengan budaya yang baik, kinerja bisa terjaga (Maksum *et al*., 2022).

Pada waktu yang lama, impelentasi sistem tata kelola serta pengawasan berbasis syariah berkontribusi besar dalam menjalankan aktivitas di lembaga keuangan. Berjalannya usaha kerap dianggap ukuran utama dalam mengevaluasi kinerja sektor perbankan. Dengan menyusun manajemen bisa membentuk kemampuan bagi lembaga untuk menyesuaikan diri pada tindakan kondisi eksternal. Dinamika ekonomi, regulasi, juga tuntutan masyarakat bisa dijawab dengan lebih terencana.

Copyright©2025: Fathiya Syahidah Nasution, Dian Zahra Syahfitri Lubis, Mutia Salwa Hutauruk, & Ahmad Wahyudi Zein

Kekuatan yang kuat pada suatu kedudukan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan pihak yang berkepentingan. Keyakinan tersebut merupakan unsur krusial ketika menciptakan relasi jangka panjang dari perbankan dan masyarakat. Ketika rasa percaya semakin tinggi, stabilitas operasional bisa terjaga dengan maksimal. Kondisi inipun mendukung adanya kemajuan yang berlangsung secara berkelanjutan. Kemajuan yang berkesinambungan sebagai bentuk kinerja perbankan yang mantap serta berkesinambungan.

Kinerja perbankan syariah sangat disebabkan dari kesesuaian antara penerapan tata kelola serta pengadaan pengawasan syariah. Prinsip *Good Corporate Governance* menyiapkan kerangka sistematis ketika mengelola suatu organisasi. Kerangka inipun menjamin langkah mengambil keputusan berjalan dengan terstruktur dan terarah. Selain itu, fungsi pengawasan syariah punya peranan dalam memelihara kepatuhan terhadap nilai serta prinsip yang dipakai. Keselarasan kedua unsur ini menciptakan hubungan yang erat pada operasional perbankan (Ana & Pakpahan, 2024).

Keseimbangan kinerja yang diperoleh tak saja menitikberatkan pada efisiensi operasional, tetapi juga mengedepankan pada etika serta moral. Penggabungan keduanya menguatkan anggapan positif perbankan syariah bagi masyarakat. Kepercayaan publik bisa berkembang dengan lebih luas serta berkelanjutan. Kondisi inipun mendorong stabilitas termasuk kemajuan lembaga keuangan syariah. Oleh sebab itu, tata kelola dan pengawasan syariah punya peranan yang strategis ketika memelihara kinerja jangka panjang.

KESIMPULAN

Good Corporate Governance dan Dewan Pengawas Syariah ialah bagian terpenting pada sistem pengelolaan perbankan syariah di Indonesia. Implementasi tata kelola yang baik menciptakan tahapan pengelolaan lembaga keuangan dengan sistematis, transparan, serta bisa bertanggung jawab. Dewan Pengawas Syariah berperan menjamin semua aktivitasi operasional menyesuaikan prinsip syariah. Keterpaduan antara tata kelola serta pengawasan syariah menciptakan fondasi suatu lembaga dengan kuat. Fondasi inipun mendorong terbetuknya stabilitas operasional perbankan syariah. Stabilitas juga ikut mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat sebagai faktor yang diperlukan pada keberlanjutan usaha perbankan syariah. Kinerja perbankan syariah terlihat dari efisiensi, kepatuhan, serta kualitas pelayanan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Albanjari, F. R., Syakarna, N. F. R., & Fauziah. (2023). Lembaga Keuangan Syariah. Cv. Media Sains Indonesia.

Ana, D., & Pakpahan, R. (2024). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Hukum Perusahaan : Mengoptimalkan Akuntabilitas Dan Transparansi Di Perusahaan Indonesia. 1(6), 83–91.

Harahap, K. (2025). Keuangan Bisnis Dan Fintech. Pt Media Penerbit Indonesia.

Harisoesyanti, K. S. (2020). Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pengembangan Masyarakat Di Komunitas Miskin Perkotaan. 2(2), 220–232.

Copyright©2025: Fathiya Syahidah Nasution, Dian Zahra Syahfitri Lubis, Mutia Salwa Hutauruk, & Ahmad Wahyudi Zein

Hatta, Z. M. (2024). Business Ecosystem & Strategy The Relationship Between Profit Sharing Ratio And Zakah Performance Ratio On Return On Assets : An Empirical Study Of Sharia Compliance And Financial Sustainability In Bank Pembiayaan Rakyat Syariah In Indonesia. 6(2), 194–207.

Hendra, & Fahlevi, A. H. (2024). Implementation Of Good Corporate Governance (Gcg) Principles In Pdam Tirta Ogan, Ogan Ilir District. Https://Doi.Org/10.23920/Jphp.V1i2.292.1

Maksum, M., Edward, E., & Indrawijaya, S. (2022). Pengaruh Profesionalisme Kerja , Karakteristik Pekerjaan , Dan Budaya Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Non Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi. 4(2), 151–162.

Mohammad, C. H. N., Saputra, D. E., & Rohman, M. Z. A. (2022). Sinergi Antara Tata Kelola Perusahaan Dan Pertumbuhan Bisnis Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Perusahaan Bumn Nonkeuangan Di Bursa Efek Indonesia). 4(2).

Muhajir, A., Abdurrahman, R., & Gassing, Q. (2024). Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syariah Dalam Realitas Sosiologis.

Mustika, M., S, A., & Malik, R. (2024). Analisis Konsep Keadilan Bagi Nasabah Dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Akad Mudharabah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Makassar.

Mustion, S., Wira, A., & Rozalinda. (2024). Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Bank Syariah Indonesia.

Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum? Jurnal Konstitusi, 19(2), 268. Https://Doi.Org/10.31078/Jk1922

Rafsanjani, H. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial). 6(1).

Rohman, H. F., & Sari, F. N. (2024). Analisis Good Corporate Governance Perbankan Syariah Indonesia : Perspektif Maqashid Syariah. 5(1), 1–16.

Rusmini, Dimas C. (2023). Mengevaluasi Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan Keuangan Di Bank Bri Syariah Melalui Rasio Keuangan Dan Laporan Keuangan.

Sari, C. F., Manajemen, P., Ekonomi, F., Madura, U. T., Manajemen, P., Ekonomi, F., & Madura, U. T. (2023). Kompetensi Individu (Individual Competence) Cindy Fatika Sari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Truojoyo Madura. 1(4).

Shalihin, R., Mar, B., & Ariadi, P. (2025). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Kepatuhan Prinsip Syariah Pada Pelaksanaan Good Corporate Governance. 11(2), 1010–1024.

Sumbodo, Y. P., Marzuki, & Yudhantara, S. M. (2024). Metode Penelitian. Pt Media Penerbit Indonesia.

Copyright©2025: Fathiya Syahidah Nasution, Dian Zahra Syahfitri Lubis, Mutia Salwa Hutauruk, & Ahmad Wahyudi Zein

Syahputri, N. A., & Adi, N. (2020). Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pegawai Oleh Pimpinan Di Kantor. 4, 3052–3063.

Yusra, Nurnarsrina, Febriyani, N., & Huda, N. (2024). Efektivitas Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Meminimalkan Risiko Kepatuhan Di Bank Syariah Di Indonesia.